



Sejarah Perubahan Kurikulum di Indonesia

Zalika Afifa^{1✉}, Adelia Pratama Putri², Risti Rahmadini³, Salsabilah⁴, Uswatun Fajriah⁵,
Abdurrahmansyah⁶

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3,4,5,6}

e-mail : zalikaafifa902@gmail.com¹, adeliapratamaputri442@gmail.com², ristirahmadini2@gmail.com³,
salsabillah260906@gmail.com⁴, uswatunfajriah66@gmail.com⁵, abdurrahmansyah73@radenfatah.ac.id⁶

Abstrak

Proses pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai penyesuaian kurikulum yang merupakan tanggapan terhadap perubahan dalam aspek sosial, politik, dan pedagogis. Kajian ini berupaya untuk memaparkan lintasan historis serta evolusi transformasi kurikulum di Indonesia semenjak periode pasca-kemerdekaan hingga masa kini. Pendekatan riset yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, yang mencakup penelaahan literatur, artefak pendidikan, dan studi-studi terdahulu yang relevan dengan implementasi dan restrukturisasi kurikulum. Temuan riset mengindikasikan bahwa Indonesia telah mengadopsi beberapa iterasi kurikulum, termasuk Rencana Pelajaran 1947, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, dan Kurikulum 2013. Setiap perubahan mencerminkan filosofi dan kebutuhan pendidikan pada masanya. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan nasional, tren global, serta kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik. Revisi terbaru menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik guna menghasilkan peserta didik yang utuh. Kesimpulannya, perubahan kurikulum di Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan bangsa untuk menyesuaikan pendidikan dengan kemajuan masyarakat dan tantangan global.

Kata Kunci: Kurikulum, Pengembangan Kurikulum, Reformasi Pendidikan, Indonesia

Abstract

The educational framework in Indonesia has been subject to numerous revisions, influenced by societal, governmental, and pedagogical advancements. This investigation is designed to elucidate the historical trajectory and evolution of curriculum modifications within Indonesia from its inception as an independent nation to contemporary times. The methodology employed is qualitative and descriptive, involving a thorough examination of existing literature, official educational documentation, and prior studies pertaining to curriculum execution and restructuring. The results indicate that Indonesia has navigated through various curriculum transitions, encompassing the 1947 Teaching Plan, the 1968 Curriculum, the 1975 Curriculum, the 1984 Curriculum, the 1994 Curriculum, the 2004 Competency-Based Curriculum, the 2006 School-Based Curriculum (KTSP), and the 2013 Curriculum. Each of these iterations mirrors the prevailing educational principles and requirements of its respective period. The changes were influenced by national policies, global trends, and the need to improve student competence and character. The latest revision emphasizes a balance between cognitive, affective, and psychomotor aspects to produce holistic learners. In conclusion, curriculum changes in Indonesia represent the nation's continuous effort to align education with societal progress and global challenges.

Keywords: Curriculum, Curriculum Development, Educational Reform, Indonesia

Copyright (c) 2025 Zalika Afifa, Adelia Pratama Putri, Risti Rahmadini, Salsabilah, Uswatun Fajriah,
Abdurrahmansyah

✉ Corresponding author :

Email : zalikaafifa902@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8626>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan krusial sebagai pilar fundamental bagi kemajuan suatu bangsa. Setiap negara memanfaatkan sektor pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, serta siap menjawab berbagai problematika berskala internasional. Khususnya di Indonesia, institusi pendidikan memegang tanggung jawab vital dalam membimbing generasi penerus agar memiliki kecerdasan intelektual yang mumpuni sekaligus kepribadian yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum berperan penting sebagai pedoman sekaligus instrumen utama dalam proses belajar mengajar. Kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan suatu rancangan menyeluruh yang mencakup tujuan, materi, metode, serta evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, perubahan kurikulum pada dasarnya merupakan refleksi dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara siswa dan guru. Tujuan guru mengajar yaitu agar bahan yang disampaikan dikuasai sepenuhnya oleh semua siswa, bukan hanya beberapa siswa saja, yang dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar. Jika semua siswa mencapai standar ketuntasan seperti yang telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran, maka siswa tersebut dapat dikatakan telah menguasai bahan yang diajarkan, artinya tujuan guru mengajar telah tercapai. (Abdurrahmansyah et al., 2017)

Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum mengalami perubahan hampir setiap satu sampai dua dekade. Hal ini terjadi karena kurikulum dipandang sebagai sebuah dokumen yang dinamis dan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada awal kemerdekaan, kurikulum berfungsi untuk menanamkan identitas nasional dan membangun semangat kebangsaan. Namun seiring perubahan rezim politik, kurikulum kemudian diarahkan untuk memperkuat ideologi tertentu, seperti pada era Orde Baru yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila. Memasuki era Reformasi, orientasi kurikulum bergeser menuju fleksibilitas, desentralisasi, serta pembentukan kompetensi individu sesuai tuntutan abad 21. Fenomena ini membuktikan bahwa kurikulum tidak hanya merupakan produk pendidikan, tetapi juga produk politik dan budaya.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan kurikulum di Indonesia sangat beragam. Dari sisi eksternal, globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi menjadi pendorong utama yang menuntut adanya pembaruan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dari sisi internal, dinamika politik dan kebijakan pemerintah sering kali menjadi alasan mendasar terjadinya perubahan kurikulum. Misalnya, kurikulum 1975 lahir pada masa pembangunan Orde Baru yang menekankan keteraturan dan efisiensi, sementara kurikulum 2013 muncul sebagai respon terhadap rendahnya kualitas pendidikan serta kebutuhan akan pendidikan karakter. Dengan demikian, setiap perubahan kurikulum mencerminkan adanya interaksi antara faktor eksternal dan internal yang membentuk arah kebijakan pendidikan di Indonesia.

Namun demikian, perubahan kurikulum yang terlalu sering juga menimbulkan berbagai problematika. Guru sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kurikulum sering menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi perubahan, baik dalam penyusunan perangkat pembelajaran maupun dalam penerapan metode yang sesuai. Siswa juga menjadi pihak yang terdampak karena harus beradaptasi dengan sistem evaluasi dan materi yang terus berganti. Selain itu, masyarakat, terutama orang tua, sering merasa kebingungan dengan perubahan mendadak yang belum sepenuhnya disosialisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak selalu membawa dampak positif jika tidak disertai dengan strategi implementasi yang matang dan dukungan yang memadai.

Selain faktor implementasi, tantangan lain dalam perubahan kurikulum di Indonesia adalah ketidaksiapan infrastruktur pendidikan. Misalnya, pada penerapan Kurikulum 2013, banyak sekolah di daerah terpencil yang mengalami kesulitan dalam menyediakan buku ajar, fasilitas teknologi, serta pelatihan guru. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah semakin lebar. Dengan munculnya

Kurikulum Merdeka, tantangan serupa kembali hadir, terutama terkait kesiapan sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi sesuai minat serta bakat siswa. Ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan ini menimbulkan pertanyaan apakah perubahan kurikulum benar-benar mampu menjawab kebutuhan semua sekolah di Indonesia, atau justru memperdalam kesenjangan yang ada.

Penelitian ini penting dilakukan karena mengisi kesenjangan pemahaman mengenai perubahan kurikulum di Indonesia yang bersifat dinamis dan kompleks serta berdampak multidimensi, baik dari sisi teknis pembelajaran maupun implikasi sosial-politik dan budaya. Tiga hingga lima penelitian sebelumnya yang relevan menunjukkan beberapa temuan kunci yang menjadi kontribusi kebaruan dan justifikasi pentingnya penelitian ini:

Penelitian oleh (Dendodi et al., 2024) menyoroti bahwa transformasi kurikulum di Indonesia memberikan dampak signifikan, khususnya dalam pengembangan personal terkait teknologi informasi. Namun, terdapat tantangan besar bagi guru dan siswa dalam adaptasi kurikulum baru yang menuntut peran aktif di setiap aspek pembelajaran. Studi (HR Widarti, 2025) mengungkapkan adanya hambatan implementasi seperti infrastruktur yang terbatas dan kurangnya pelatihan guru, khususnya di daerah terpencil, sehingga menghambat efektivitas penerapan kurikulum baru di lapangan.

Kajian oleh (AT Daga, 2025) menunjukkan bahwa perubahan kurikulum berdampak pada peran guru yang harus menyesuaikan metode mengajar dengan tuntutan baru, tetapi seringkali adanya perubahan yang terlalu cepat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan adaptasi. (M. Syaifulloh, 2025) membahas keunggulan Kurikulum Merdeka yang memberi keleluasaan dan fleksibilitas kepada guru dan siswa, namun menegaskan ketimpangan kesiapan sekolah terutama di wilayah dengan sarana terbatas yang berpotensi memperdalam kesenjangan pendidikan.

Penelitian (Belay, 2022) dari hasil analisis evolusi kurikulum menegaskan bahwa perubahan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi memang meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi membutuhkan perumusan kebijakan yang konsisten untuk mengurangi dampak negatif perubahan yang terlalu sering.

Gap analisis atau kesenjangan yang ditemukan adalah kurangnya kajian yang mengintegrasikan aspek historis perubahan kurikulum dengan faktor pendorong eksternal dan internal sekaligus menilai dampaknya secara holistik terhadap kesiapan infrastruktur, kapasitas guru, dan adaptasi siswa di berbagai daerah. Penelitian ini berupaya mengisi kekurangan tersebut dengan menganalisis pola perubahan kurikulum, kontribusi faktor politik dan budaya, serta konsekuensi praktik di lapangan.

Penelitian ini penting karena selain menambah pemahaman akademis tentang evolusi kurikulum, juga memberikan masukan untuk kebijakan kurikulum yang lebih berkesinambungan, kontekstual, dan dapat mengatasi problematika implementasi, sehingga pendidikan nasional dapat bergerak menuju pemerataan kualitas dan relevansi di era global tanpa mendatangkan Ketidakpastian dan tekanan yang berlebihan untuk para pengajar dan peserta didik. Oleh karena itu, studi ini memberikan sumbangan inovatif yang dapat dijadikan rujukan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih efisien dan adil di masa yang akan datang.

Penelitian ini penting dilakukan karena perubahan kurikulum tidak hanya berdampak pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap arah pembangunan pendidikan nasional. Dengan menelusuri sejarah perubahan kurikulum di Indonesia, kita dapat memahami pola, faktor pendorong, serta konsekuensi dari setiap perubahan. Analisis sejarah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan kurikulum yang lebih terpadu, berkelanjutan, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa menimbulkan kebingungan bagi pengajar, pelajar, dan masyarakat. Dengan mempelajari sejarah, diharapkan kita tidak hanya mengambil pelajaran dari keberhasilan, tetapi juga dari kegagalan sebelumnya dalam menyusun sistem pendidikan yang lebih baik untuk generasi di masa depan.

METODE

Studi literatur ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah dokumen, teks, dan literatur yang berkaitan dengan sejarah perubahan kurikulum di Indonesia. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber secara sistematis, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang mereka pelajari. Menurut (Handoko, 2024), penelitian kualitatif deskriptif cocok digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, termasuk kebijakan pendidikan, karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan data dalam konteks sejarah, sosial, dan politik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: sumber primer dan sumber sekunder. Kategori pertama mencakup dokumen kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kategori kedua mencakup peraturan menteri yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Sumber sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional terindeks Sinta, Dalam penelitian ini, sebanyak 25 literatur yang diambil sebagai objek kajian, berasal dari artikel jurnal internasional dan laporan penelitian yang relevan dengan topik perubahan kurikulum di Indonesia. Standar pemilihan literatur didasarkan pada beberapa kriteria utama untuk menjamin kualitas dan kredibilitas sumber. Pertama, literatur diambil hanya dari jurnal internasional bereputasi yang terindeks dalam basis data ternama seperti Scopus dan Web of Science, atau diakui oleh institusi pendidikan tinggi nasional dengan parameter reputasi jurnal yang jelas seperti SJR dan Impact Factor. Kedua, artikel yang dipilih telah melalui proses peer-review sehingga dipastikan memiliki validitas ilmiah yang tinggi. Ketiga, literatur yang digunakan sebagian besar diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2013–2025), guna memastikan kajian yang up-to-date dan relevan dengan konteks perkembangan kurikulum yang dinamis saat ini. Selain itu, literatur yang dipilih umumnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa resmi lainnya yang dapat diakses secara luas secara daring. Dengan standar ini, penelitian berhasil mengumpulkan sumber-sumber terpercaya yang menjadi landasan kuat dalam analisis, sehingga menghasilkan kontribusi yang valid dan signifikan bagi pengembangan kebijakan pendidikan kurikulum di Indonesia. serta karya ilmiah yang relevan. Pemilihan sumber sekunder didasarkan pada kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan data. Misalnya, literatur dari (2019_Tesis_Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural.Pdf, n.d.) digunakan untuk memahami perspektif historis, sedangkan literatur yang lebih baru seperti Aisyah (2020) digunakan untuk menelaah perkembangan kurikulum pada abad ke-21.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi kata kunci seperti “kurikulum Indonesia”, “sejarah kurikulum”, “perubahan kurikulum”, dan “kebijakan pendidikan” untuk mencari literatur yang relevan. Kedua, peneliti mengakses database jurnal nasional (Sinta, Garuda, dan Google Scholar) serta dokumen resmi pemerintah melalui situs Kemendikbudristek. Ketiga, literatur yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan periode kurikulum, mulai dari Rentjana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum Merdeka tahun 2020-an. Keempat, dilakukan proses seleksi untuk memastikan hanya literatur yang kredibel dan relevan yang digunakan dalam analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh masa penjajahan yang membentuk struktur sistem pendidikan pada awal abad ke-20. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum pendidikan lebih berorientasi pada kepentingan kolonial dan pembentukan tenaga kerja rendahan untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam serta administrasi pemerintahan kolonial (Collins et al., 2021)

Selama periode kolonial Belanda, model pendidikan terbagi menjadi dua jenis utama:

1. Pendidikan bagi kelompok Eropa
Menyediakan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi anak-anak bangsa Belanda dan kelompok elite lokal.
2. Pendidikan untuk golongan Pribumi
Dirancang untuk menghasilkan tenaga birokrat menengah dan rendah, seperti guru, perawat dan pegawai rendahan.

Kurikulum pada masa itu sangat terbatas dan tidak merata. Isi pelajaran lebih banyak fokus pada bahasa Belanda, agama, dan keterampilan dasar administratif. Tidak ada upaya signifikan untuk membangun kesadaran nasional atau mengembangkan identitas budaya lokal (IWI Praekanata, 2024)

Menurut Abdurrahmansyah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (Abdurrahmansyah & Rismawati, 2022)

1. Sejarah Kurikulum di Era Zaman Belanda

Departemen Pendidikan Nasional RI. 2003 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional. Di Jakarta: Departemen Pendidikan. Pemerintah Belanda mendirikan berbagai jenis sekolah untuk orang Indonesia di masa kolonial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari berbagai lapisan masyarakat. Secara garis besar, pendidikan di Belanda dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah selama pemerintahan VOC dan yang kedua adalah setelah pembubaran VOC.

a. Masa VOC

Awalnya, kedatangan Belanda ke Indonesia bukan hanya menjajah, tapi juga berdagang. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan besar, khususnya dari hasil rempah-rempah. Cara kolonialisasi yang mereka lakukan cukup sederhana: Belanda tetap mempertahankan kekuasaan para raja setempat, namun menuntut monopoli perdagangan dan menguasai sumber daya alam.

Sebelum Belanda datang, bangsa Portugis telah lebih dahulu menetap di wilayah timur Indonesia sejak awal abad ke-16. Mereka membawa serta para misionaris Katolik, terutama dari Ordo Jesuit yang dipimpin oleh Fransiskus Xaverius. Xaverius menilai bahwa pendidikan merupakan sarana efektif untuk menyebarkan agama Katolik di kalangan penduduk pribumi.

b. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (Setelah VOC)

Karena pendidikan di masa VOC dianggap gagal sepenuhnya, pemerintahan baru Hindia Belanda harus memulai dari nol setelah VOC dibubarkan. Pandangan liberal dan pencerahan (Enlightenment), yang menganggap pendidikan sebagai kunci kemajuan ekonomi dan sosial memengaruhi pemerintahan ini.

Raja Lodewijk memberikan tugas kepada Gubernur Jenderal Deandels pada tahun 1808 untuk memperbaiki nasib rakyat pribumi dan menghapus perdagangan budak. Namun, kebijakan Deandels justru memperburuk keadaan rakyat karena menerapkan kerja paksa (rodi).

Deandels memerintahkan para bupati di Pulau Jawa untuk mendirikan sekolah dengan biaya sendiri agar anak-anak pribumi dapat belajar sesuai adat dan kebiasaan mereka dalam bidang pendidikan. Selain itu, ia mendirikan perguruan tinggi bidan di Jakarta dan perguruan tinggi ronggeng di Cirebon.

Namun, pada tahun 1826, sistem pendidikan kembali terganggu karena kebijakan penghematan. Sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang beragama Nasrani, dengan alasan keterbatasan keuangan karena Perang Diponegoro (1825–1830) dan perang Belanda-Belgia (1830–1839) yang memakan banyak biaya dan korban.

2. Kurikulum pada Masa Pendudukan Jepang

Tidak seperti Belanda, Jepang datang ke Indonesia dengan motivasi yang berbeda. Jika Belanda datang untuk perdagangan dan menyebarkan keyakinan Kristen, Jepang datang untuk kepentingan politik dan militer, yang sejalan dengan keyakinan imperialisnya.

Walaupun masa pendudukan Jepang hanya kira-kira 3,5 tahun (1942–1945), pengaruhnya terhadap pendidikan Indonesia cukup besar dan menjadi inspirasi bagi sistem pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Namun, secara umum, pendidikan pada masa Jepang justru mengalami kemunduran. Jepang memanfaatkan Indonesia sebagai basis perang dan mewajibkan seluruh penduduk, termasuk guru dan siswa, untuk membantu kepentingan militer. Akibatnya, banyak sekolah ditutup dan kegiatan belajar mengajar tidak berjalan efektif.

Berikut beberapa perubahan penting pada masa Jepang, yaitu:

- Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar menggantikan bahasa Belanda.
- Sistem pendidikan telah disatukan dan tidak lagi bersifat diskriminatif.
- Pendidikan dasar diseragamkan menjadi enam tahun.
- Sekolah Belanda ditutup dan pelajaran berbaur Eropa dihapus.
- Sekolah swasta hanya boleh membuka sekolah kejuruan atau bahasa.

Selain itu, Sekolah Taman Siswa mengalami perubahan nama. Taman Dewasa berganti nama menjadi Taman Tani, dan Taman Guru dan Taman Madya ditutup. Jepang, di sisi lain, mendukung pendidikan Islam, khususnya di pesantren, dengan memberikan bantuan dan kunjungan ke pesantren besar. Selain itu, mereka memberikan izin untuk berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kahar Muzakir, Bung Hatta, dan KH. Wahid Hasyim.

Dalam pendidikan guru, Jepang membentuk beberapa jenis sekolah:

- Sekolah guru 2 tahun (*shoto shihan gakko*),
- 4 tahun (*cuutoo shihan gakko*), dan
- 6 tahun (*koto shihan gakko*).

Selain itu, pendidikan dibagi menjadi tiga tahap:

- 6 tahun sekolah dasar (*kokumin gakko*),
- 3 tahun sekolah menengah pertama, dan
- 3 tahun sekolah menengah tinggi

Dalam hal kurikulum, pemerintah Jepang menghapus hierarki pendidikan yang ada di Belanda, yang membedakan siswa pribumi dan nonpribumi. Semua jenjang diseragamkan dalam satu sistem Sekolah Rakyat (SR). Selain itu, Jepang mendorong penggunaan bahasa Indonesia di sekolah dan memberikan dana untuk memperbaiki kurikulum, terutama bagi sekolah Islam dan madrasah. Namun, pengawasan terhadap madrasah di daerah terpencil sangat terbatas.

Kurikulum pesantren juga berubah. Pada tahun 1942, pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Geografi ditambahkan. Metode belajar yang diterapkan adalah metode klasikal (di sekolah formal) dan metode pengajian (di pesantren) dengan sistem bandongan dan sorogan. Metode klasikal dijalankan secara terjadwal di pagi hari, sedangkan metode pengajian dilakukan tanpa jenjang, lebih menekankan pada pemahaman kitab.

3. Kurikulum dan Pendidikan Masa Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia masih banyak dipengaruhi model Jepang. Pemerintah segera menyusun kebijakan pendidikan baru, termasuk peningkatan jumlah guru dan pembangunan sekolah. Jenjang pendidikan dibagi menjadi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Nilai-nilai nasionalisme dan semangat cinta tanah air menjadi fokus utama pembelajaran.

Beberapa lembaga pendidikan sebelumnya juga berperan dalam perkembangan pendidikan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Pagoeyoeban Pasoendan (1913), dan Taman Siswa (1922). Sekolah mulai dibuka di berbagai daerah, dan pendidikan diberikan secara gratis meski kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah. Untuk mencetak tenaga pendidik, pemerintah mendirikan berbagai lembaga seperti KPK-PKB, SG, SGA/KPG, Kursus B-1 dan B-2.

Menurut Kartono (1997) kondisi pendidikan pascakemerdekaan menunjukkan beberapa tantangan: Nasional. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Metode pembelajaran masih bersifat pasif dan tidak kritis.
- Akses pendidikan di pedesaan sangat terbatas, angka buta huruf tinggi.
- Pola pendidikan kolonial masih terasa.
- Bahasa daerah terpinggirkan.
- Muncul kesenjangan antara kelompok elit terdidik dan masyarakat bawah.

Dalam periode 1945–1950, terjadi enam kali pergantian Menteri Pendidikan, mulai dari Ki Hajar Dewantara hingga S. Mangunsakoro. Meski sering berganti, beberapa kemajuan dicapai seperti pembentukan Sekolah Guru A, B, dan C.

a. Pendidikan Rendah (Sekolah Rakyat)

Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPK tahun 1946, dengan fokus pada pelajaran Bahasa Indonesia dan Berhitung sebanyak 38 jam pelajaran per minggu.

b. Pendidikan Guru

Terdapat 3 jenis sekolah guru:

- SGB (Sekolah Guru B) – 4 tahun, untuk mencetak guru Sekolah Rakyat.
- SGC (Sekolah Guru C) – 2 tahun, untuk memenuhi kebutuhan guru dengan cepat.
- SGA (Sekolah Guru A) – 4 tahun, untuk menghasilkan guru yang lebih terampil dan berpengetahuan luas.

c. Pendidikan Menengah Umum

Terdiri dari SMP dan SMT (Sekolah Menengah Tinggi). Kurikulumnya masih berupa rencana pelajaran sederhana. SMP dibagi menjadi kelas A (bahasa dan administrasi) dan kelas B (ilmu alam dan pasti). Ujian negara baru diterapkan mulai tahun 1947.

d. Pendidikan Kejuruan (Vokasional)

Mencakup sekolah dagang, sekolah kepandaian putri (SKP), sekolah teknik, dan sekolah guru teknik. Tujuannya untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang ekonomi, industri, dan kewanitaian.

e. Pendidikan Tinggi

Universitas mulai muncul, seperti Universitas Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Kedokteran, Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta, dan universitas yang didirikan di daerah pendudukan Belanda seperti Universitas Darurat dan Universitas Indonesia (1947).

4. Kurikulum Masa Orde Lama (1950–1966)

Pada Orde Lama, Undang-Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954 menjadi dasar hukum pendidikan negara. Saat itu, sistem ujian nasional sudah diterapkan secara terpusat dengan aturan yang ketat namun tetap menjunjung kejujuran dan kualitas. Pemerintah juga mulai mendirikan universitas di berbagai provinsi, meskipun perguruan tinggi yang memiliki mutu terbaik masih terpusat di Pulau Jawa, seperti UI, ITB, IPB, UGM, dan UNAIR. Di luar Jawa, perkembangan pendidikan tinggi masih terbatas karena kekurangan dosen dan sarana prasarana.

Kurikulum pendidikan pada masa ini terbagi dalam tiga periode utama, yaitu:

a. Kurikulum Rentjana Peladjaran (1947-1968)

Meskipun kurikulum ini baru dimulai tahun 1950, kurikulum pertama setelah kemerdekaan disebut "Rencana Pelajaran 1947". Kursus ini tidak semata-mata menekankan pengetahuan; sebaliknya, itu menekankan pembentukan karakter, kesadaran nasional, dan kehidupan sosial.

Dengan tujuan mengajarkan siswa untuk hidup dan beradaptasi di masyarakat, fokus utamanya adalah pembelajaran sosial dan pendidikan karakter. Dalam proses belajar, kemampuan bekerja sama (belajar hidup bersama) diutamakan melalui kegiatan seni dan olahraga dengan penekanan pada aspek afektif dan psikomotorik.

b. Kurikulum Rentjana Peladjaran Terurai (1952)

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan memiliki silabus yang lebih komprehensif dan disusun dengan lebih baik. Karena sangat rinci, guru adalah yang paling penting dalam menentukan materi dan standar keberhasilan siswa. Guru tetap diposisikan sebagai objek pembelajaran.

Setiap rencana pelajaran harus terkait dengan kehidupan sehari-hari, menurut kurikulum 1952. Guru mulai mengajar berdasarkan spesialisasi. Kelas masyarakat juga muncul, yaitu sekolah bagi lulusan Sekolah Rakyat (SR) yang belum melanjutkan ke SMP. Siswa dididik dalam keterampilan nyata seperti pertanian, perikanan, dan pertukangan untuk mempersiapkan mereka untuk bekerja.

Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni Suara, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan Keputerian, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Budi Pekerti, dan Pendidikan Agama merupakan seluruh mata pelajaran yang diajarkan di tingkat Sekolah Rendah.

c. Kurikulum 1964 (Rencana Pendidikan 1964)

Kurikulum ini didasarkan pada konsep Pancawardhana, yang menekankan pengembangan lima aspek utama dalam diri peserta didik:

- Cinta tanah air dan bangsa,
- Moral keagamaan dan nasional,
- Kecerdasan serta kepekaan estetika,
- Keterampilan tangan,
- Kesehatan jasmani.

Kurikulum ini berorientasi pada pendidikan yang aktif, kreatif, dan produktif, dengan tujuan membentuk manusia yang mampu memecahkan masalah secara mandiri (problem solving). Pembelajaran juga diarahkan pada kegiatan praktis dan sosial yang relevan dengan kehidupan anak.

Selain itu, dikenal adanya hari krida (hari Sabtu), yaitu hari untuk kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni, budaya, dan olahraga. Secara ideologis, kurikulum ini berfungsi membentuk manusia pancasilais yang bersifat sosialis, sejalan dengan politik pemerintahan Presiden Soekarno.

Dalam bidang administrasi, sistem penilaian mulai berubah. Untuk kelas 1 dan 2 SD, huruf A, B, C, dan D digunakan, sedangkan untuk kelas 3–6 SD, nilai 10 hingga 100 tetap digunakan. Kurikulum 1964 juga menggunakan pendekatan kurikulum subjek terpisah; mata pelajaran dibagi menjadi lima kelompok menurut bidang Pancawardhana:

- Moral: Pendidikan Sosial dan Agama
- Kecerdasan: Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung dan Sains
- Emosional/Artistik: Pembelajaran Seni
- Keterampilan: Mengajar Keprigelan
- Jasmani: Mengajar Jasmani

5. Kurikulum pada Masa Orde Baru (1966–1998)

Menurut Ardanareswari (2019) selama masa pemerintahan Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia mengalami 4 kali perubahan kurikulum, yaitu tahun 1968, 1975, 1984, serta 1994. Seluruh kebijakan pendidikan saat itu bercorak sentralistik, artinya pemerintah pusat menjadi pengendali utama dalam penyusunan dan penerapan kurikulum. Akibatnya, arah pendidikan lebih menekankan pada keseragaman hasil belajar, pembentukan karakter berbudi luhur, serta pengamalan ajaran agama serta nilai Pancasila.

Meskipun pendidikan mengalami kemajuan dibanding masa sebelumnya, kurikulum Orde Baru sarat dengan unsur indoktrinasi ideologi. Sejak diberlakukannya program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) pada 1969, pemerintah mulai menyesuaikan isi pendidikan agar sejalan dengan program pembangunan nasional.

Salah satu kebijakan penting adalah munculnya Kurikulum 1975 yang berorientasi pada hasil belajar (output oriented). Berdasarkan pendapat Doni Koesoema A. (2007) kurikulum saat Orde Baru sangat menekankan pada pelajaran ideologi Pancasila. Hal ini diwujudkan lewat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), mulai diterapkan pada tahun ajaran 1976. Kemudian, pada Kurikulum 1984, pemerintah menambahkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang bersifat serupa, yaitu menekankan hafalan tentang sejarah perjuangan nasional.

a. Kurikulum 1968

Kurikulum ini ialah penyempurnaan dari Kurikulum 1964 dan menjadi simbol perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Fokus utamanya adalah membentuk manusia Pancasilais sejati, beriman, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani, cerdas, dan terampil. Isi pembelajaran diarahkan pada pengembangan pengetahuan dasar, kecakapan khusus, dan penguatan nilai-nilai Pancasila.

Kurikulum ini tetap menggunakan konsep Pancawardhana, yang menekankan lima aspek perkembangan peserta didik: intelektual, moral, keterampilan, emosional, dan jasmani. Kurikulum 1968 bersifat sentralistik, dengan pendekatan subject matter (berpusat pada mata pelajaran). Siswa lebih banyak menjadi penerima informasi pasif, sementara guru menjadi pusat pembelajaran. Materinya cenderung teoretis dan belum dikaitkan dengan kehidupan nyata.

Struktur kurikulum dibagi menjadi tiga kelompok besar:

- Pembinaan Jiwa Pancasila – mencakup Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Olahraga.
- Pengembangan Pengetahuan Dasar – mencakup Berhitung, Ilmu Pengetahuan Alam, Kesenian, dan Kesejahteraan Keluarga.
- Pembinaan Kecakapan Khusus – meliputi Pendidikan Kejujuran.

Kurikulum ini kerap disebut sebagai "Kurikulum Bulat" karena hanya mencakup mata pelajaran utama,

dan secara umum ditujukan untuk memperkuat ideologi Pancasila.

b. Kurikulum 1975

Perubahan kurikulum tahun 1975 dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, sistemnya masih sangat sentralistik dan pelaksanaannya di lapangan belum merata—banyak sekolah masih menggunakan Kurikulum 1968.

Faktor penyusunan kurikulum baru antara lain: munculnya gagasan pendidikan nasional pada masa Pelita I, hasil analisis mutu pendidikan yang rendah, dan munculnya inovasi pembelajaran baru yang dianggap lebih efisien.

Kurikulum 1975 memiliki beberapa prinsip utama:

- Berorientasi pada tujuan, dengan hierarki tujuan mulai dari nasional hingga instruksional khusus (TIU dan TIK).
- Pendekatan integratif, di mana setiap pelajaran saling berkaitan.
- Efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya.
- Penerapan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional) sebagai pedoman pembelajaran.

- Berdasarkan teori Behaviorisme, menekankan latihan (drill) dan hubungan stimulus-respons.

c. Kurikulum 1984

Kurikulum ini lahir karena Kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Masalah utama saat itu meliputi ketidaksesuaian materi dengan kemampuan siswa, isi yang terlalu padat, dan kesenjangan antara rancangan dan praktik di sekolah (M Zid, 2023).

Kurikulum 1984 berorientasi pada tujuan institusional serta memperkenalkan sistem caturwulan (pembagian tahun pelajaran menjadi tiga tahap). Kurikulum ini menekankan efisiensi waktu belajar dan keefektifan pengalaman belajar di sekolah. (T Triwiyanto, 2024)

d. Kurikulum 1994

Kurikulum ini dikenal sangat akademis dan padat, dengan penekanan utama pada mata pelajaran bahasa dan eksakta. Selama tiga tahun, kurikulum 1994 telah diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia dari jenjang SD hingga SMA, menunjukkan bahwa sosialisasinya berhasil. Karena kurikulum 1994 didominasi oleh pelajaran eksakta dan bahasa, penekanan akademik sangat kuat. Pelajaran seni tidak memiliki banyak waktu. Selain itu, kurikulum 1994 memiliki struktur kurikulum yang rumit dan penuh materi, yang terdiri dari struktur kurikulum baik nasional maupun lokal.

Kurikulum 1994 merupakan kurikulum operasional yang dirancang dan diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia dari tahun akademik 1994/1995 hingga 2003/2004. Kurikulum 1994 adalah hasil penyempurnaan dari Kurikulum 1984. Sistem caturwulan diterapkan untuk membagi waktu pelajaran dalam kurikulum ini. Diharapkan bahwa sistem caturwulan, yang membagi tahun ajaran menjadi 3 tahap, akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memanfaatkan materi pelajaran secara maksimal. Salah satu ciri khas dari Kurikulum 1994 ialah penerapan sistem caturwulan yang membagi pelajaran menjadi beberapa tahapan. Selain itu, pendidikan di lembaga pendidikan lebih menekankan pada materi pelajaran yang cukup padat atau berfokus pada konten pelajaran. Terakhir, Kurikulum 1994 sangat terkenal karena diterapkan bagi semua peserta didik di Indonesia. Kurikulum ini berfungsi sebagai kurikulum inti, yang mencakup bidang tertentu.

6. Kurikulum Pendidikan Masa Reformasi

Setelah Orde Baru berakhir dalam kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era Reformasi, babak baru dalam sejarah pemerintahannya. Presiden B. J. Habibie mengambil alih kekuasaan selama masa transisi ini. Dalam bidang pendidikan, kebijakan kurikulum pada masa Habibie belum mengalami perubahan signifikan dan masih berpedoman pada Kurikulum 1994, yang terus diterapkan hingga masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Ketika kepemimpinan beralih kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, Kurikulum 1994 mulai mengalami penyempurnaan yang menghasilkan Kurikulum 2000, kemudian diperbaiki lagi menjadi Kurikulum 2002. Perkembangan berikutnya adalah lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004, yang menjadi tonggak awal reformasi besar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum baru ini diimplementasikan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Konsep KBK menitikberatkan pada pengembangan 3 fokus utama, yaitu:

1. Afektif — pembentukan sikap dan nilai;
2. Kognitif — penguasaan pengetahuan; dan
3. Psikomotorik — pengembangan keterampilan dan kemampuan praktis.

Menurut Depdiknas (2002), KBK adalah sekumpulan rencana dan pengaturan yang mencakup strategi pembelajaran, pemanfaatan sumber daya, hasil belajar yang diharapkan, dan kemampuan siswa. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan

kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman, di tengah perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi di seluruh dunia.

Dalam pandangan Saylor (1981), Kurikulum yang berfokus pada kompetensi merupakan suatu rancangan pembelajaran yang disusun berdasarkan kompetensi tertentu, dengan tahapan belajar yang terstruktur dan hasil belajar yang dapat diukur. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran bukan sekadar menghafal isi pelajaran, melainkan belajar bagaimana cara belajar sebagaimana diungkapkan oleh Eve Krakow (2003).

- Konsep dan Struktur Kurikulum KBK

Program Berbasis Kompetensi terdiri dari kompetensi standar dan kompetensi dasar untuk setiap bidang. Standar kompetensi mencakup semua kemampuan yang diharapkan dari siswa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi dasar adalah definisi yang lebih khusus dari standar kompetensi tersebut. Standar isi (standard content) serta standar kinerja (standard performance) adalah dua komponen penting dari standar kompetensi.

Materi pokok yang diajarkan disusun berdasarkan bidang kajian tertentu yang mencakup isi, proses, dan keterampilan yang relevan dengan konteks keilmuan. Sementara itu, indikator pencapaian digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah memperoleh hasil belajar yang sudah ditetapkan (Pinton Setya Mustafa, 2021)

Menurut Rahdiyanta (2003) KBK diarahkan agar siswa mampu mengembangkan seluruh potensi dirinya secara optimal, mampu mengonstruksi pengetahuan sendiri, dan dapat mengaplikasikan hasil belajar dalam kehidupan nyata. Proses pembelajaran dalam KBK bersifat kontekstual, memperhatikan kemampuan individu, kondisi lingkungan, sumber daya, norma, serta penerapan nilai-nilai yang relevan.

Dilihat melalui ciri-ciri tersebut, jelas bahwa teori konstruktivisme sangat memengaruhi KBK; teori ini menganjurkan peserta didik agar aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar yang bermanfaat.

- Ciri-ciri Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu :

Menurut Rahdiyanta (2013), terdapat beberapa karakteristik utama dari KBK, antara lain:

1. Fokus pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun kelompok.
2. Berorientasi dengan hasil belajar, dengan menghargai keragaman kemampuan peserta didik.
3. Menggunakan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan belajar.
4. Sumber belajar tidak terbatas pada guru, melainkan berbagai media dan lingkungan belajar lain.
5. Penilaian menitikberatkan pada proses dan hasil belajar, bukan hanya hasil akhir.

- Kelebihan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya:

1. Mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh pada setiap mata pelajaran, tidak hanya berfokus pada penguasaan materi.
2. Menggalakkan pembelajaran yang berfokus pada siswa (student-centered learning), sehingga siswa terlibat secara aktif dalam keberlangsungan belajar dengan melibatkan indera, tubuh, dan pikiran mereka.
3. Memberikan keleluasaan kepada guru supaya merancang silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah serta domisili masing-masing.
4. Menyediakan sistem evaluasi yang lebih rinci, di mana setiap aspek penilaian dijelaskan secara jelas agar memudahkan perbaikan hasil belajar siswa.
5. Menekankan pentingnya proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir, sehingga siswa dapat mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri secara optimal.

Dalam penerapannya, KBK menuntut guru untuk kreatif dalam mengelola proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berorientasi pada kompetensi nyata. Dengan demikian, pendidikan di masa reformasi diharapkan mampu menghasilkan generasi cerdas, kompeten, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan global.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Kurikulum ini ialah kurikulum operasional yang dibuat serta diterapkan oleh sekolah secara pribadi. Standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), didasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, KTSP disusun.

KTSP muncul sebagai paradigma baru dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, memberikan sekolah kebebasan yang leluasa untuk mengelola sumber daya, dana, dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Sistem ini memberikan sekolah tanggung jawab penuh untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan visi, misi, dan tujuan mereka sendiri.

Dalam penerapannya, sekolah diharapkan mampu mengembangkan indikator kompetensi, menyusun strategi pembelajaran, serta memberdayakan berbagai potensi lingkungan sekitar dengan tetap mempertanggungjawabkannya pada masyarakat dan pemerintah.

KTSP memiliki karakteristik berbeda dari kurikulum sebelumnya karena memberikan kewenangan penuh pada sekolah (school-based curriculum). Model ini mirip dengan School Based Curriculum Development (SBCD) di Australia yang telah diterapkan sejak 1977 (Laurie Brady, 1983).

SBCD terbukti efektif karena memberi kesempatan sekolah untuk menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan serta potensi lokal secara mandiri. Melalui KTSP, guru, kepala sekolah, dan peserta didik memiliki ruang yang luas untuk berinovasi dan berkreasi dalam proses belajar. Masyarakat juga dilibatkan agar pengelolaan pendidikan menjadi lebih demokratis dan transparan. Secara umum, karakteristik KTSP mencakup:

1. Otonomi penuh bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum.
2. Keterlibatan masyarakat serta orang tua dalam pelaksanaan kurikulum.
3. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional.
4. Kerja sama tim yang solid dan transparan.

Komponen utama KTSP, yaitu:

- a) Tujuan pendidikan,
- b) Struktur dan muatan kurikulum,
- c) Kalender pendidikan, dan
- d) Silabus serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

c. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 adalah kebijakan pemerintah untuk memajukan mutu pendidikan Indonesia supaya bisa bersaing di era global. Kurikulum ini menekankan ekspansi kecakapan abad ke-21, misalnya kemampuan analitis mendalam, komunikasi, tanggung jawab moral, toleransi, serta kesiapan menghadapi kehidupan global (Diah Rusmala Dewi, 2019).

Perubahan menuju Kurikulum 2013 merupakan bagian dari proses change and continuity-penyempurnaan dari KTSP 2006 yang dinilai masih memiliki kekurangan dalam konsep dan pelaksanaannya. Kurikulum ini dikembangkan agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta lebih fokus pada peningkatan kualitas peserta didik secara holistik.

Selain itu, K-13 memperkuat tata kelola pendidikan, memperdalam materi, serta menyesuaikan beban belajar agar lebih efektif. Pada jenjang sekolah dasar, kurikulum ini menerapkan pendekatan tematik integratif (integrated curriculum), yaitu pembelajaran yang menghubungkan beberapa mata pelajaran agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang bermakna (Nawangsari et al., 2020)

Menurut Enco Mulyasa (2013) K-13 juga menekankan pentingnya Kompetensi Inti (KI) sebagai pengikat antar silabus. Kompetensi inti berfungsi mengintegrasikan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga siswa tidak hanya menguasai pengetahuan, namun juga memiliki kepribadian dan keahlian yang simetris antara kemampuan teknis dan juga keterampilan sosial.

Struktur Kurikulum 2013 dibagi menjadi mata pelajaran wajib dan pilihan. Di tingkat SMA/MA, mata pelajaran pilihan bersifat akademik, sementara di SMK/MAK, bersifat akademik dan vokasional. Sedangkan di SD/MI dan SMP/MTs, belum terdapat mata pelajaran pilihan karena menyesuaikan usia peserta didik.

Beban belajar di SD/MI ditetapkan berdasarkan jumlah jam per minggu:

Kelas I = 30 jam, Kelas II = 32 jam, Kelas III = 34 jam,

Kelas IV–VI = 36 jam per minggu, dengan durasi 35 menit per jam pelajaran.

d. Kurikulum Merdeka Tahun 2022

Kurikulum Merdeka yaitu cara pemerintah dalam memberi sekolah kebebasan untuk membuat program pendidikan mereka sendiri. Hal ini dilakukan untuk membuat kurikulum lebih penting serta sebanding dengan perubahan global yang cepat.

Kurikulum ini berkonsentrasi pada menanamkan keterampilan modern seperti berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, juga bekerja sama. Sekolah yang diberi kebebasan diharapkan dapat menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik siswa (Hanipah, 2023).

Kurikulum Merdeka memberi guru serta kepala satuan pendidikan "kemerdekaan" untuk menata, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan sekolah (Zulfahmi 2023) Kurikulum Merdeka juga bertujuan untuk mengembangkan profil anak atau siswa agar memiliki jiwa dan nilai yang sesuai dengan Pancasila. Dimensi yang tercakup dalam Kurikulum Merdeka antara lain bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, beriman, mandiri, berkebinekaan global, bergotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis.

Pembelajaran tanpa kurikulum hanya berfokus pada keperluan siswa. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka akan membantu siswa memperoleh kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan zaman. Hasilnya didukung oleh teori pendidikan yang menekankan betapa pentingnya membangun keterampilan pada abad 21 ini selama pembelajaran berlangsung.

Pembelajaran dan kurikulum adalah dua istilah yang dikenal dalam dunia pendidikan. Kurikulum adalah inti literatur teori kurikulum. Kurikulum terdiri dari dokumen secara konseptual, tetapi dilaksanakan sebagai kegiatan pembelajaran.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka membawa perubahan besar dalam berbagai aspek belajar, termasuk pendekatan pengajaran, evaluasi, dan pengaturan pembelajaran di kelas. Pergeseran ini berpotensi berdampak pada motivasi siswa secara signifikan. Di satu sisi, fleksibilitas dan penyesuaian pembelajaran yang ditawarkan oleh Kurikulum Merdeka diharapkan bisa mendorong minat serta partisipasi siswa dalam proses belajar (Afriantoni et al., 2025).

Penerapan Kurikulum Merdeka di perguruan tinggi Islam juga menurut perubahan dalam struktur organisasi dan konten kurikulum. (Abdurrahmansyah, 2019) dalam artikelnya "Model Organisational Structure of the Kulliyat Mu'allimin Al-Islamiyah Curriculum Content" menyoroti bahwa penyesuaian struktur organisasi dan konten kurikulum diperlukan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara efektif. Hal ini mencakup penyesuaian dalam metode pengajaran, evaluasi, serta pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

e. Kurikulum Cinta

Kurikulum Berbasis Cinta adalah upaya Kementerian Agama RI untuk mengubah pendidikan madrasah menjadi lebih inklusif dan humanis. Menurut panduan resmi, program pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan rasa toleran, humanis, nasionalis, dan naturalis. Kurikulum Cinta berpusat ke

pembentukan sikap berbudi luhur juga saling menghargai melalui penerapan nilai cinta sebagai landasan pembentukan kepribadian siswa. Menurut Menag, metode ini berfokus pada aspek emosional-moral dan bukan hanya kognitif, oleh karena itu diharapkan akan menciptakan generasi yang mencintai ilmu serta tindakannya (Arham, 2025).

Kurikulum Cinta mengenalkan ekoteologi, yaitu pandangan bahwa alam semesta adalah tajalli (manifestasi) Tuhan sehingga manusia wajib memperlakukan lingkungan dengan cinta dan hormat.

Integrasi Terbukti bahwa memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam pembelajaran agama meningkatkan kesadaran lingkungan siswa. Sebagai contoh, "dengan mengintegrasikan hadis ekologi dalam kurikulum, sekolah alam dapat mencetak generasi muda yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi." Hasil serupa menyatakan bahwa hadis ekologi memberikan dasar moral untuk pelestarian alam, mendidik siswa untuk menjadi agen perubahan yang menjaga kelestarian lingkungan di masa depan (Lutfiyah & Kurjum, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil serta pembahasan penelitian, bisa disimpulkan bahwasanya perubahan kurikulum di Indonesia merupakan refleksi dari perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berlangsung, dengan setiap kurikulum hadir untuk menjawab kebutuhan zamannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan sistem evaluasi yang menyeluruh. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan dan pelaksanaan perubahan kurikulum yang mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta kapasitas sumber daya manusia agar perubahan tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga efektif dan merata. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang humanis, kontekstual, dan kompetitif secara global, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia sebagai fondasi utama pembangunan pendidikan nasional. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan kurikulum yang berkesinambungan dan didukung oleh sinergi semua pihak demi peningkatan mutu pendidikan nasional tanpa menimbulkan ketidakpastian atau kesenjangan pendidikan di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul "Sejarah Perubahan Kurikulum di Indonesia". Dengan adanya karya ini, kami berharap dapat membantu dan memberikan gambaran mengenai perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan motivasi, sehingga karya ini dapat membantu dan meningkatkan kurikulum di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah. (2019). *Peran Pendidikan In-formal dalam Mendidik Anak pada Keluarga Broken Home di Kelurahan Bukit Lama Kota Palembang*.
- Abdurrahmansyah, A., Oktiansyah, R., & Eftalina, E. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Aptitude-Treatment Interaction (ATI) terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IX MTs Patra Mandiri 1 Palembang pada Mata Pelajaran IPA Biologi. *Bioilmi: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 58–63. <https://doi.org/10.19109/bioilmi.v3i1.1340>
- Abdurrahmansyah, A., & Rismawati, I. (2022). Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi melalui Sistem

- 1565 *Sejarah Perubahan Kurikulum di Indonesia - Zalika Afifa, Adelia Pratama Putri, Risti Rahmadini, Salsabilah, Uswatun Fajriah, Abdurrahmansyah*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8626>
- Penjamin Mutu dengan Pendekatan Total Quality Managemen. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i2.177>
- Afriantoni, Dhea, A.-Z. V., Sari, W., & Nuria. (2025). Online Journal System 01. *MANJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 10–17.
- Arham, R. (2025). Model Kurikulum Cinta di MIN 22: Ekoteologi, Moderasi, Nasionalisme. *Journal of Islamic Education Studies*, 4(1), 89–96. <https://doi.org/10.58569/jies.v4i1.1331>
- AT Daga. (2025). *INOVASI KURIKULUM Merespon Tantangan Pendidikan Abad 21*.
- Belay, B. S. (2022). No Title 2005–2003 , (8.5.2017) 5, *הארץ*, 5, 167–186.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No Title 済
無 No Title No Title No Title. 11, 167–186.
- Dendodi, D., Nurdiana, N., Astuti, Y. D., Aunurrahman, A., & Warneri, W. (2024). Dampak dan tantangan terhadap Transformasi kurikulum di Satuan Pendidikan. *Journal of Education Research*, 5(2), 1071–1080. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.960>
- Diah Rusmala Dewi. (2019). Pengembangan Kurikulum Di Indonesia Dalam Menghadapi Tuntutan Abad Ke-21. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.123>
- Handoko, Y. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*.
- Hanipah, S. (2023). Analysis of the Merdeka Belajar Curriculum in Facilitating 21st Century Learning in Senior High Students. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 1(2), 264–275.
- HR Widarti. (2025). *Wawasan Pendidikan Kimia: Sebuah Perspektif Ilmu*.
- IWI Praekanata. (2024). *Menelusuri Arah Pendidikan: Dinamika dan Inovasi Kurikulum di Indonesia*.
- Lutfiyah, S. K., & Kurjum, M. (2024). Analisis Hadis tentang Ekoteologi dan Relevansinya dalam Membangun Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Sekolah Alam. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 270–280. <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i3.3858>
- M. Syaifulloh. (2025). *MUTU LITERASI SAINS BERBASIS MOODLE DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN PENDEKATAN R&D UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA SMP*.
- M Zid. (2023). *Pengembangan kurikulum dan sumber belajar geografi*.
- Nawangsari, D., Ag, M., Muhit, H. A., & Pd, M. (2020). *PROBLEMATIKA PENDEKATAN ILMIAH (SCIENTIF APPROACH) DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM ARJASA TESIS* Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M . Pd .) Dosen Pembimbing: PASCASARJANA IAIN JEMBER DESEMBER 2019 i.
- Pinton Setya Mustafa. (2021). Problematika Rancangan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan dalam Kurikulum 2013. *Edumapsul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 184–195. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/947%0Ahttps://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/download/947/433>
- T Triwiyanto. (2024). *Manajemen kurikulum dan pembelajaran. 2019_Tesis_Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural.pdf*. (n.d.).